

# ANALISIS GERAKAN POLITIK ALIANSI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENOLAKAN EKSPLOITASI TAMBANG MANGAN DI KAMPUNG TUMBAK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Yohanes Firman Gili<sup>1</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2</sup>, Bandyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik Universitas Udayana

Email: [Firman\\_yohan@yahoo.co.id](mailto:Firman_yohan@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [Piers\\_Noak@yahoo.com](mailto:Piers_Noak@yahoo.com)<sup>2</sup>, [Dyah\\_3981@yahoo.com](mailto:Dyah_3981@yahoo.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research aims to determine a things behind the resistance of the Community Alliance according to the decree by the Head of East Manggarai Regency number HK.81-2009 in Lambaleda Distrik and same factors that influence the resistance Alliance Movement's can be success. The informants in this study are eight people who are member of the Movment Alliance are pastors, youth leaders (student), local goverments Alliance and parties involvet in Alliance Society resistance. This research was conduted in Lambaleda Districk, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Timur province, the research time was from june 2016 until august 2016. Research metho with direct interview and documentation. Data analisis used descriptive qualitative to describe and explain a background of Community Alliance make a resistance movement of mine in East Manggarai Regency succeed. The result of this study have explained, there are several factors behind the resistance movement by Community Alliance which are the lack of community involvement in the formulation of the policy, the lack of the socialization conducted by the Government and the police that's not target. Some of these factors caused the emergency of the resistance movement by the Community Alliance of hiden resistance (not organized) and open resistance (organized)*

**Keywords:** *Community Alliance, Resistance, Mining Business License (MBL)*

## 1. PENDAHULUAN

Gerakan sosial atau gerakan massa, adalah salah satu fenomena penting dalam sejarah perkembangan suatu negara baik negara maju, negara berkembang, maupun negara yang sedang berkembang, sebagian besar kejadian atau peristiwa yang mengubah sebuah suatu negara, dari segi politik, segi ekonomi, ataupun segi sosial budaya, seringkali berawal dari sebuah gerakan yakni gerakan sosial, Seiring dengan berkembangnyasuatu negara penyebaran isu tentang kebijakan-kebijan pemerintah, baik isu nasional maupun internasional. Gerakan sosial bukan hanya terpaku pada masalah politik, ekonomi, maupun sosial-budaya saja,

tetapijuga menyebar pada permasalahan-permasalahan tentang lingkungan hidup atau permasalahan-permasalahan lainnya.

Escobar dan Alvarez (1992) dalam pengamatannya terhadap gerakan sosial menemukan bahwa gerakan sosial itu beralih dari perjuangan kelas ekonomi yang terbatas menuju ke transformasi sosiasl yang lebih luas. Di negara berkembang, salah satunya negara Indonesia, gerakan sosial selalu berhubungan erat dengan pendekatan perubahan sosial yang dominan atau(*mainstream approach*), yaitu melalui perubahan yang dibuat atau dirancang oleh negara, dan yang sering disebut dengan pembangunan. Suatu kejadian yang dianalisa dan dibuat untuk membawa ke depanmajuan

dan kemakmuran dinegara berkembang dan yang sedang berkembang.

Sejak munculnya tren bahan tambang di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini, maka wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mendapat perhatian dari pemodal yang memiliki minat di sektor ini. Berbagai bangsa mengunjungi wilayah ini, seperti, Cina, India, Korea Selatan, mereka berebut pengaruh dengan mendekati pemerintah daerah dan masyarakat dengan menggandeng masyarakat lokal, investor lokal, dan nasional.

Penyelidikan potensi pertambangan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai secara keseluruhan telah dimulai 1980 oleh PT Aneka Tambang, Penyelidikan itu terus dilakukan hingga sekarang. Hasil pemetaan dan penyelidikan geologi dan geokimia sejak tahun 1980 hingga 2008 menyebutkan beberapa temuan endapan mangan di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur (JPIC OFM 2008).

Kekuasaan untuk mengelola tambang ataupun pertambangan mulai dari pusat sampai kabupaten atau kotadimut atau tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dengan hadirnyakedua peraturan yang termuat dalam UU tersebut semestinyamampu memperkuat pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah menyalagunakan kekuasaan demi kepentingan individual dan kelompok.

Kasus sengketa tambang mangan dengan warga di Kampung Tumbak, desa satar punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT adalah konspirasi besar antara Bupati Manggarai Timur, pihak kepolisian, dan perusahaan tambang, PT Aditya Bumi Pertambangan. (Kertas Posisi JPIC OFM)

Adanya Surat izin usaha pertambangan di kampung Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur yang dikeluarkan oleh Bupati Yosep Tote yang termuat dalam SK Bupati Manggrai Timur, Yosep Tote No. HK/81-2009, Izin usaha pertambangan mangan di atas lahan seluas 2.222 hektar tersebut dipegang PT Aditya Bumi Pertambangan, Lahan tambang merupakan tanah ulayat warga yang belum dijadikan lahan garapan dan sedang dalam proses sengketa antara warga sejak tahun 2007 (Flores pos.com 2009).

Keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di desa Tumbak mengakibatkan adanya reaksi dari warga desa yang didukung oleh WALHI, pastoran, Keuskupan, Komnas HAM, dan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Kelompok Pemuda Untuk Advokasi Tambang Manggarai Timur. Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) menolak draft revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Minerba versi Pemerintah yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2016 (HIMMAMATIM 2014).

Sedangkan Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola atau terjadinya gerakan aliansi masyarakat sipil dalam menolak eksploitasi tambang mangan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang gerakan masyarakat menolak eksploitasi tambang mangan tumbak desa Satar Punda, Kabupaten Manggarai Timur, didahului dengan melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian, majalah, dan bahan referensi lainnya..

Pertama, Sufyan (2011) dalam skripsinya menjelaskan tentang “Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bahwa adanya ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah dalam melindungi masyarakat dan malah mengadai atau menjual hak tanah milik masyarakat.

Kedua Aziz (2012), dalam skripsinya menjelaskan tentang “Identitas Kaum Samin Pasca Kolonial Pergulatan Negara, Agama, Dan Adat Dalam Pro-Kontra Pembangunan Pabrik Semen Di Sukilo, Pati, Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini peneliti menggugurkan pisau analisis subalternity Gayatri Spivak, untuk menggali politik identitas dalam pergerakan kaum samin paka Kolonial.

Ketiga Maximus Regus (2011) dalam jurnalnya menjelaskan tentang, “Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus, Tambang di Manggarai NTT. Adapun perbedaan dari skripsi ini adalah di mana penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya memfokuskan pada penyebab terjadinya perlawanan masyarakat sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah yang dilakukan oleh aliansi dalam menolak tambang.

### Gerakan sosial Baru

Gerakan sosial merupakan suatu pertarungan orang-orang yang menggerakkan perlawanan dan sedang mengusahakan perubahan sosial terhadap pola relasi di dalam suatu masyarakat.

Gerakan sosial bisa merupakan gerakan yang sama sekali tidak terlibat secara langsung dengan proses produksi pada masyarakat industri. Oleh sebab itu, Laclau dan Mouffe (1985), mengembangkan pendekatan Gramsci dan menyatakan bahwa ‘gerakan sosial baru’ merupakan pendekatan alternatif atas kemacetan pendekatan Marxisme tradisional.

Gerakan perlawanan merupakan gerakan yang dibuat dan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau pribadi (individual) yang merasa terintimidasi dan munculnya situasi ketidakadilan di antara mereka ataupun pemerintah dan masyarakat.

## **Teori Struktur Mobilisasi Sumber Daya**

Teori ini bersangkutan dengan tugas kepemimpinan dimasing-masing instansi baik formal maupun informal dan yang terlibat dalam gerakan ekologi sehingga bagaimana solidaritas dibuat oleh semua yang melakukan gerakan ekologi yang tersebar diseluruh penjurunegara dan di peruntukan sebagai sumber daya untuk dimobilisasi.

## **Contentious Politik**

Literatur gerakan sosial, khususnya teori "*Contentious Politics*" dikembangkan oleh Dough McDam, Sydney Tarrow dan Charles Tilly (2001), menjelaskan bagaimana gerakan menentang tambang berkembang. Teori "*Contentious Politics*" memiliki variabel yang relevan menjelaskan gerakan anti tambang seperti tingkat keluhan tinggi, warisan-warisan protes sebelumnya, dan peran perantara.

## **3. METODE**

Penelitian yang diteliti merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti gunakan dikarena tujuan penelitian berada pada masyarakat guna menggali, menjelaskan, dan memberi interpretasi terhadap hasil informasi dari penuturan informan di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur statistik (kuantitatif). Penelitian kualitatif dapat menggambarkan kehidupan tentang masyarakat, sejarah, perilaku,

organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dengan wawancara langsung serta Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan latar belakang Aliansi Masyarakat melakukan perlawanan dan yang membuat gerakan penolakan tambang di Kabupaten Manggarai Timur Berhasil.

## **4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor No.HK/81-2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Aditya Bumi Pertambangan.Penyelarasan Izin Usaha Pertambangan yang tercantum dalam SK Bupati Nomor No.HK/81-2009 memunculkan pergolakan dari warga di Kecamatan Lamba Leda. Perlawanan warga ini membuat renggang hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

### **Latar Belakang Perlawanan**

*Pertama*, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan, Penyesuaian izin usaha pertambangan dalam SK Nomor No. HK/81-2009 yang diterbitkan Bupati Manggarai Timur. Dalam penerapannya menjadi penolakan oleh rakyat dikarenakan masyarakat beranggapan jika pertambangan dapat merusak ekosistem.Sikap Pemkab Manggarai Timur yang tertutup untuk membuat kebijakan sehingga membuat rakyat tidak percaya terhadap pemerintah daerah. Dalam membuat kebijakan harusnya ikut melibatkan semua

orang yang berpengaruh di bidangnya untuk kepentingan rakyat kecamatan Lamba Leda.

*Kedua*rendahnya sosialisasi. Perlawanan rakyat terhadap kebijakan Bupati manggarai Timur timbul pada awal tahun 2009, muncul dikarenakan adanya kegiatan eksplorasi tambang oleh PT.Aditya Bumi Pertambangan di beberapa daerah kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.Kecamata Lamba Leda berada di dataran tinggi bagian timur kabupaten manggarai dan berbatasan dengan Poco Ranaka. Pengeksplorasian oleh PT.Aditya Bumi Pertambangan membuat masyarakat terganggu dikarenakan mengganggu kegiatan sehari-hari warga yang berprofesi sebagai petani dan pengembala. Pelaksanaa eksplorasi oleh PT.Aditya Bumi Pertambangan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati yakni SK No.Hk/81-2009.

*Ketiga* kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Adanya SK Yang Di keluarkankan Bupati membuat rakyat mengklaim bahwa kebijakan ini hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok yang berkedok kepentingan publik atau untuk masyarakat.

### **Faktor Keberhasilan Gerakan**

Ada dua bentuk perlawanan yang dijalankan oleh kelompok masyarakat, dan rakyat Kecamatan Lamba Leda dalam upaya menolak SK Bupati Manggarai Timur tentang Izin Usaha Pertambangan yaitu, perlawan individu atau perorangan (tidak terorganisir) dan

perlawan kelompok atau bersama-sama (terorganisir) yaitu aliansi masyarakat yaitu Aliansi masyarakat (JPIC, KOMNAS HAM, WALHI, Masyarakat, PMKRI), dan didukung oleh HRWG (*Human Rights Working Group*).

*Pertama* perlawanan tidak terorganisir Keberadaan SK HK.81-2009 tentang Izin UsahaPertambangan, masyarakat hanya mendengar kabar dari mahasiswa Manggarai yang berkordinasi dengan mahasiswa manggarai di kota Kupang dan JPIC yang berada diluar daerah bahwa diKecamatan Lamba Leda ada SKNo. HK/81-2009 tentang izin usaha pertambangan yang diterbitkanPemerintah Kabupaten Manggarai Timur atas nama PT.Aditya Bumi Pertambangan.Kemudian mahasiswa beserta masyarakat melakukan investigasidilokasi tambang seperti didesa Satar Punda, Waso, Satar Teu, dan Lengko Lolok. Sehingga didapat beberapa SK serupa yaitu SK No.HK/81-2009 tentang Izin UsahaPertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Manggarai Timur.

Sebelum dibentuknya Aliansi Masyarakat, perlawanan yang dilakukan olehmasyarakat Kecamatan Lamba Leda masih dilakukan secara individu atau perorangan atau dengan kata lain tepecah belah pada daerah masing-masing dan gerakan bersifat tersembunyi atau diam-diam.

*Kedua*Perlawanan berkelompok (Terorganisir). Perlawanan yang dilakukan masyarakat Lamba Leda bersamaan dengan adanya dukungan oleh lembaga, kelompok

maupun organisasi yang di buat atau di bentuk mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan perlawanan bersama-sama atau melakukan perlawanan terbuka, dimana perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat (scott,1998). Sejak dibentuknya Aliansi masyarakat anti tambang, penolakan ataupun perlawanan rakyat secara terang-terangan melakukan demonstrasi ataupun unjuk rasa.

Setelah menyuarakan isu-isu untuk memotivasi rakyat untuk bersama-sama melakukan perlawanan, sehingga terbentuklah suatu kelompok, sehingga terbentuklah suatu kelompok yang menolak sekaligus melakukan perlawanan terhadap tambang yang bernama aliansi masyarakat anti tambang yang bertujuan untuk mengumpulkan masa serta kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan secara terpisah serta mencari lokasi- lokasi untuk memobilisasi mereka, secara umum dalam konteks ini adalah keluarga, jaringan pertemanan, tempat kerja maupun elemen-elemen negara guna untuk menjadi lokasi mobilisasi massa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diantara banyak penyebab, salah yang meningkatkan ketegangan adalah ketidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dimana pada saat kejadian itu Camat tidak bisa memberikan penjelasan yang sesuai atas tuntutan aliansi, gagalnya membangun komunikasi membuat aliansi melakukan aksi yang dimana kantor

camat menjadi korban amukan aliansi. Kejadian di kantor kecamatan Lamba Leda di karenakan tidak adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan aliansi, kegagalan membangun komunikasi dikarenakan ketidakadanya penyesuaian sikap diantara aliansi dan pemerintah kecamatan serta kedua belah pihak selalu mempertahankan argumen beserta asumsi masing-masing, disamping itu juga aliansi merasa kesal ataupun emosi dikarenakan aliansi menganggap pemerintah kecamatan terlalu sombong dan angkuh karena merasa lebih tinggi dibandingkan dengan aliansi. Hal ini mengakibatkan susah nya membangun komunikasi dan membutuhkan waktu yang lama, disamping itu juga komunikasi tidak berjalan dengan lancar karena tidak adanya sopan santun, rasionan dan kondusif.

Saat terjadinya kericuhan Pemkab melapor kepada Polresta Manggarai Timur atas tindakan pengrusakan kantor oleh aliansi hal ini seharusnya tidak terjadi, karena dimana pemkab seharusnya membuat atau membangun ruang dialog guna meredakan suasana dan memulihkan hubungan antar aliansi dan pemerintah. Tidak hanya itu setelah pemkab melaporkan aksi tersebut masyarakat dan aliansi mendapat intimidasi dari kepolisian. Beberapa rangkaian aspirasi yang disuarakan aliansi ataupun demonstrasi belum menemukan titik terang ataupun jalan keluar yang seimbang, sehingga dibuatnya kajian sebagaimana mestinya cara aliansi melakukan lobi atau membangun komunikasi yang baik untuk du

gunakan dalam tawar menawar tuntutan terhadap pemda.

Tanggal 21 juni 2014 aliansi masyarakat mengadakan rapat guna melakukan evaluasi terhadap tuntutan kepada Pemkab agar segera mencabut SK No.HK. 81-2009 dan membebaskan masyarakat yang mendapat penahanan dan menjadi tersangka pada saat unjuk rasa di kantor Kecamatan, setelah itu tanggal 24 juni 2014 aliansi masyarakat menuju kantor Bupati Manggarai Timur mendapat halangan dari pihak kepolisian.

Pada tanggal 17 september 2014, terjadi pertemuan sekaligus dialog (mediasi pertama sejak terjadinya konflik) di Aula Pemda Manggarai Timur antara Pemda, beberapa perwakilan DPRD, Bupati Matim, dan Aliansi Masyarakat. Dalam dialog terbuka Aliansi Masyarakat Mendesak Pemerinta Daerah (Bupati) mencabut Izin Usaha Pertambangan di Manggarai Timur. Bupati Bupati Manggarai Timur melakukan negosiasi dengan perwakilan Aliansi Masyarakat dengan menawarkan penghentian sementara ijin eksplorasi tambang mangan dan membekukan SK. HK.81-2009.

### **Analisa Gerakan Politik**

Gerakan sosial politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang tergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan melawan elite, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Perusahaan yang beraliansi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan

masing-masing dalam pertambangan mangan ini, PT. Aditya Bumi Pertambangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Aparat (TNI-POLRI), Tua Teno (Kepala Klan), dan beberapa masyarakat Desa Satar Punda yang setuju dengan adanya pertambangan mangan di desa tersebut. Meskipun begitu Pemerintah Daerah secara institusi lebih cenderung mendukung PT. Bumi Aditya Bumi Pertambangan, untuk melakukan kegiatan pertambangan mangan.

Dalam kaitan ini, dibutuhkan konsep mobilisasi struktur (*mobilizing structure*) yang dapat menjelaskan bahwa gerakan sosial itu membutuhkan organisasi, baik organisasi formal maupun tidak. Namun, organisasi gerakan gerakan haruslah memiliki struktur yang mudah untuk dimobilisir. Dalam konsep *mobilizing structure* ini menekankan pentingnya peranan aktor atau agent untuk memobilisasi struktur organisasi agar gerakan sosial mencapai hasilnya. Dalam konteks ini, organisasi Gabungan Aliansi bersama masyarakat sipil yang menentang adanya Izin Usaha Pertambangan di Desa Satar Punda, tentu tidak lepas dari peranan aktor-nya dalam memobilisasi massa sehingga meletuslah Gerakan Aliansi dalam Penolakan Eksploitasi Tambang.

### **4. KESIMPULAN**

Gerakan yang terjadi disebabkan kerana tidak atau kurang terlibanya rakyat untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan pertambangan di Kecamatan Lamba leda Kabupaten Manggarai Timur selain itu

kurangnya sosialisasi juga yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara masyarakat dan Pemkab Manggarai Timur.

Dengan adanya pertentangan yang di timbulkan oleh Pemerintah Daerah sehingga penulis menemukan adanya penyebab yang menimbulkan gerakan perlawanan sehingga gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat berhasil merubah kebijakan Bupati Manggarai Timur dalam SK No.HK.81-2009 yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan atas nama PT.Aditya Bumi Pertambangan diantaranya, dengan adanya dukungan masyarakat yang kuat terhadap gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat yang dengan cara memberikan pengetahuan tentang politik, tambang, serta dampak dari pertambangan itu sendiri di setiap daerah di Kabupaten terutama bagi masyarakat di kecamatan yang menjadi lokasi pertambangan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Bupati Manggarai Timur yakni SK No.HK81-2009 dengan melibatkan mahasiswa serta aktivis yang sebelumnya tergabung dalam aliansi masyarakat anti tambang yang menolak keputusan SK Bupati Manggarai Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA:

##### Buku

Fisher, Simon, dkk (2001). *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British Council, Indonesia, Jakarta.

Prastowo, Andi (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta. Ar-Ruzz Media.

Soetopo (1999). *Teori Konflik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. (2002). *International Relations the Key Concepts*, . London: Routledge

-----, 1981. "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (editor). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.

Bryant, Raymond L and Sinead Bailey. *Third World Ecology Politic*. London and New York :Routledge, 1997.

Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics, 2nd ed.*. Cambridge, UK : Cambridge University Press.

R, Robert, Albert dan Gilbert. 2009. Buku Pintar Pekerja Sosial, jilid 2. Jakarta. Gunung Mulia

Fakih, Mansour. 2010. Masyarakat sipil dan Transformasi sosial. Yogyakarta. Insist Press

Jebaru, Alex, et.al. 2009. "Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?" Ledalero: Maumere.

Tilly, Charles (1977) *From Mobilization To Revolution*. Michigan: University Of Michigan

----- *From Interactions To Outcomes In Social Movement*. Dalam Giugni, Marco, Doug McAdam, dan Charles Tilly (eds). *How Social Movements Matter*, Minneapolis: University Of Minnesota Press.

Tarrow, Sidney. (1996). *Fishnets, Internest and cathe: Globalization and Transnational Collective Action*. Working Paper 1996/78, March 1996

#### Referensi

#### Disertasi, Tesis, dan Artikel Ilmiah

Ragus, Maximus. 2011. "Tambang dan Perlawanan Rakyat: study kasus Tambang di Manggarai NTT." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 16. No. 1, Januari 2011:1-26

Undang-Undang No 4 Tahun 2009, Pasal 1, Tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Pertambangan Republik Indonesia No.37 Tahun 1960

Undang-undang Pokok Pertambangan No.11 Tahun 1967, Pasa 3

Surat Keputusan Bupati Manggrai Timur, NO.HK/81-2009

Flores pos 18-08-2014

*Flores Pos 19-09-2014*

Web

<http://indonesia.ucanews.com/2014/09/19/gereja-keuskupan-ruteng-dan-perjuangan-tolak-tambang>. Diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul 17.22 pm.

<http://www.mongabay.co.id/2015/01/07/pater-simon-pejuang-penjaga-manggarai-dari-tambang>. Diakses pada tanggal 20 april 2016, pukul 2.30 am.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20289319-S-Devy%20Dhian%20Cahyati.pdf> diakses pada tanggal 30 april 2016 pukul 02.50 am.

[www.manggarai.go.id](http://www.manggarai.go.id), diakses 29 september 2016.

